



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 2 Februari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
UNIT KERJA : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

I. DATA PRIBADI

- Nama : ILHAM ARDIANSYAH
- Jabatan : KEPALA BIDANG
- NHK : 221373

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	1.855.619.304
1. Tanah dan Bangunan Seluas 525 m2/250 m2 di KAB / KOTA KOTA MATARAM , HIBAH TANPA AKTA Rp. 1.338.386.535		
2. Tanah Seluas 2727 m2 di KAB / KOTA LOMBOK BARAT, HADIAH Rp. 517.232.769		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	421.546.576
1. MOBIL, HONDA JAZZ GK5 1,5 RS CVT (CKD) MP/MINIBUS Tahun 2014, HADIAH Rp. 188.238.006		
2. MOTOR, HONDA [763] D1A02N19M1 A/T / SPM R 2 Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 12.100.000		
3. MOBIL, HONDA CR-V RM3 2WD 2.4 AT CKD / JEEP Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 221.208.570		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	170.086.954
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	58.091.875
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	2.505.344.709
III. HUTANG	Rp.	---
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.505.344.709

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.